

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2024

Tarish Syarifah Rahman

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: tarishsyarifah.22011@mhs.unesa.ac.id

Prayudi Setiawan Prabowo

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: prayudiprabowo@unesa.ac.id

Abstrak

Meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami penurunan hingga mencapai 10.83% pada tahun 2024, wilayah ini secara paradoks tetap mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara PDRB per kapita, Laju Pertumbuhan Penduduk, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat kemiskinan. Menggunakan unit analisis 5 kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta selama periode 2017-2024 (40 observasi), data diestimasi menggunakan metode regresi data panel dengan Model Efek Tetap (FEM). Temuan studi mengindikasikan bahwa PDRB per kapita, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berkorelasi signifikan dengan kemiskinan. Sementara itu, IPM berkorelasi negatif dan signifikan kepada kemiskinan. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan periode data serta potensi endogenitas konseptual dari penggunaan indikator IPM komposit. Implikasi kebijakan berfokus pada penguatan kapasitas manusia dan pemenuhan layanan dasar di kawasan prioritas seperti Kulon Progo dan Gunungkidul.

Kata Kunci: PDRB per kapita, Pertumbuhan Penduduk, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan

JEL: I32, O15, R11

Abstract

Although the poverty rate in the Special Region of Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) declined to 10.83% in 2024, the region paradoxically continues to record the highest poverty rate on the island of Java. This study aims to analyze the correlation between per capita GRDP, population growth rate, the Human Development Index (HDI), and the open unemployment rate with the poverty rate. Using the five regencies/cities in the Special Region of Yogyakarta as the unit of analysis over the 2017–2024 period (40 observations), the data were estimated using the panel data regression method with a Fixed Effects Model (FEM). The study findings indicate that per capita GRDP, population growth rate, and the open unemployment rate do not show a significant correlation with poverty. Meanwhile, the HDI shows a significant negative correlation with poverty. Study limitations include the scope of the data period and the potential for conceptual endogeneity arising from the use of the composite HDI indicator. Policy implications focus on strengthening human capacity and ensuring the provision of basic services in priority areas such as Kulon Progo and Gunungkidul.

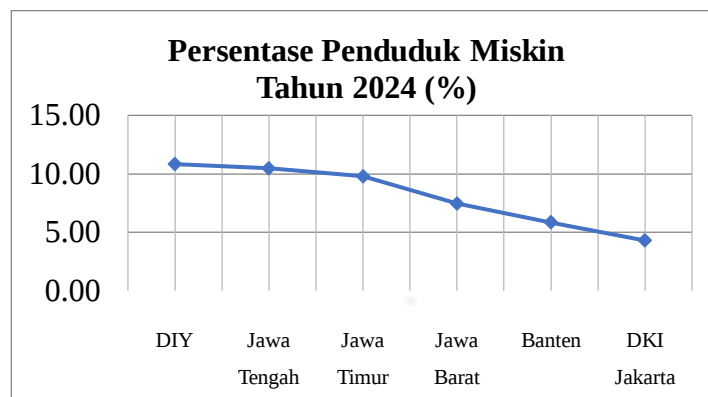
How to Cite: T.S Rahman & P.S.Prabowo (2026).Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2024. *Independent : Journal Of Economics*, 6(2), 50-71.

Keywords: *GRDP per capita, Population Growth, Human Development Index, Open Unemployment Rate, Poverty*

JEL: *I32, O15, R11*

PENDAHULUAN

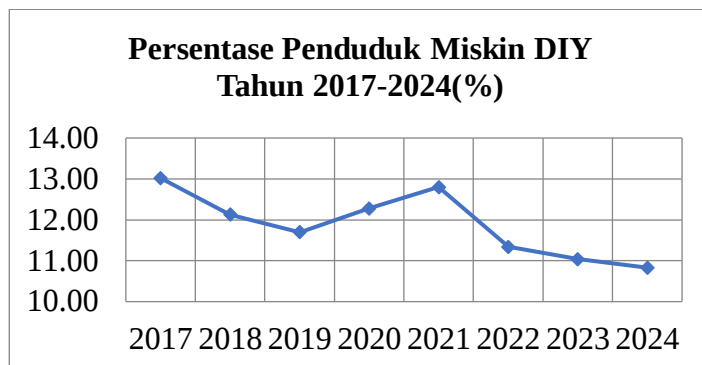
Kemiskinan tetap menjadi masalah yang kompleks dan persisten di banyak negara berkembang, seperti Indonesia. Isu tersebut tidak sekadar melibatkan perekonomian, namun juga berupa politis dan struktural (Meytriana dkk., 2025). *World Bank* (2004) dalam (Nasrulloh, 2025), kemiskinan merujuk pada kondisi ketidakberdayaan ekonomi, di mana keterbatasan penghasilan atau aset menghalangi seseorang untuk memenuhi standar minimum hidup, seperti pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan papan yang layak. Sementara BPS, secara metodologis menganut pendekatan *Cost Basic Needs* (CBN) dalam memaknai kemiskinan sebagai keadaan di mana individu tidak memiliki kemampuan finansial guna melengkapi standar minimum keperluan pokok makanan dan non-makanan (Qomarina dkk., 2025).



Gambar 1. Persentase Kemiskinan Penduduk Pulau Jawa Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

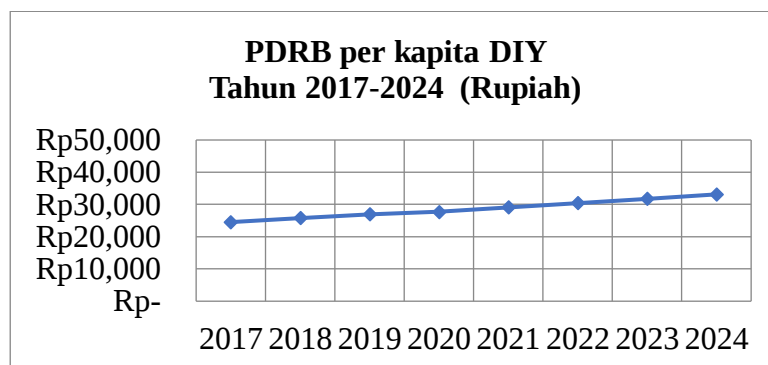
Secara nasional, Indonesia telah mencatatkan tren positif dalam penurunan angka kemiskinan sepanjang periode 2017-2024. BPS (2024) pada gambar 1, proporsi penduduk miskin menyusut dari 10.12% (22.77 juta jiwa) pada 2017 menjadi 9.03% (25.22 juta jiwa) di tahun 2024. Kendati demikian, capaian ini belum sepenuhnya merata. Terdapat kesenjangan dalam persebaran kemiskinan antardaerah, di mana sejumlah kelompok prasejahtera masih sulit mengakses standar hidup yang layak dan terperangkap dalam siklus kemiskinan. Kondisi ini merefleksikan *deprivation trap*, seperti yang digagas Chambers (1983), yaitu lingkaran setan yang saling memperkuat, seperti sifat kemiskinan itu sendiri, kondisi fisik yang lemah, isolasi sosial dari banyak jaringan masyarakat, kerentanan terhadap gangguan multifaktor (bencana alam, kegagalan panen, dan penyakit), serta ketidakberdayaan. Paradoks ini menemukan bentuknya yang nyata di Pulau Jawa sebagai episentrum ekonomi nasional, yang justru menyimpan kantong-kantong kemiskinan yang signifikan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi contoh konkret, keterbatasan ekonomi memicu minimnya akses nutrisi dan kesehatan, serta memperparah isolasi sosial dari pasar kerja formal. Rantai ini menciptakan kerentanan yang tinggi terhadap guncangan multifaktor, seperti bencana Siklon Tropis Cempaka (2017) dan Pandemi COVID-19 (2020) yang dengan cepat meruntuhkan ketahanan rumah tangga. Akibatnya,

peningkatan PDRB per kapita di DIY belum mampu menekan angka kemiskinan secara drastis. Pada 2024, persentase penduduk miskin DIY mencapai 10.83%, angka yang melampaui rata-rata nasional 9.03%, bahkan lebih besar dibanding Jawa Tengah serta Jawa Timur dengan total populasi yang banyak.



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin DIY Tahun 2017-2024
Sumber: BPS D.I. Yogyakarta (2024b)

BPS D.I. Yogyakarta (2024b) pada gambar 2, tingkat kemiskinan di provinsi ini menunjukkan dinamika fluktuatif selama periode 2017-2024. Pada tahun 2017, angka kemiskinan mencapai 13.02%, yang sedang terletak di atas rata-rata umum. Lonjakan ini, terutama dipicu oleh Siklon Tropis Cempaka, yang memicu curah hujan ekstrem, banjir, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur yang meluas. Dampaknya sangat signifikan terhadap penghidupan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Menurut BPSDMP DIY (2025) sebagai respons, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah (DPKP DIY) melakukan strategi mitigasi, seperti perbaikan sistem drainase, introduksi tanaman tahan bencana bersiklus pendek, serta diversifikasi tanaman. Upaya pemulihan tersebut berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 12.13% pada 2018 dan 11.70% pada 2019. Namun, tren positif ini terputus pada masa pandemi COVID-19, di mana kemiskinan kembali meningkat menjadi sebesar 12.28% (2020) dan 12.80% (2021). Kontraksi di sektor ekonomi penyebab utamanya. Pada tahun 2022 hingga 2024, tren penurunan kembali terlihat dengan angka mencapai 10.83%. Meskipun mengalami perbaikan, DIY tetap tertulis selaku provinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan terbesar di Pulau Jawa.



Gambar 3. PDRB per kapita Provinsi DIY Tahun 2017-2024
Sumber: BPS D.I. Yogyakarta (2024c)

Hal ini menunjukkan bahwa upaya daerah dalam mengurangi kemiskinan masih lambat. Situasi siklus kemiskinan yang memperkuat diri, di mana kerentanan terhadap bencana, isolasi sosial, dan ketidakberdayaan membuat kemiskinan sulit diatasi, terlihat dari produktivitas komunitas yang rendah, yang dibuktikan dengan penurunan PDRB per kapita. Danti dkk (2024), PDRB per kapita ditentukan melalui PDRB dibagi dengan total populasi. Menurut BPS D.I. Yogyakarta (2024c) pada gambar 3, perekonomian D.I. Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. PDRB per kapita provinsi ini meningkat secara stabil dari Rp. 24.534 pada tahun 2017 menjadi Rp. 33.140 di tahun 2024. Dalam hal ini lima sektor menjadi penggerak utama pertumbuhan tersebut, yaitu sektor industri manufaktur (berkontribusi rata-rata 12.46% atau Rp. 18.838.234), sektor akomodasi makanan dan minuman (berkontribusi rata-rata 9.96% atau Rp. 15.167.485), sektor konstruksi (berkontribusi rata-rata 9.95% atau Rp. 15.122.682), sektor perikanan, kehutanan, dan pertanian (berkontribusi rata-rata 9.91% atau Rp. 15.093.013), dan sektor informasi dan komunikasi (berkontribusi rata-rata 9.37% atau Rp. 14.407.869). Namun demikian, meski pertumbuhan ekonomi tampak positif, kemiskinan belum menunjukkan penurunan yang sejalan dengan peningkatan PDRB per kapita tersebut.

Faktor lain yang memengaruhi peningkatan kemiskinan adalah Laju Pertumbuhan Penduduk. Menurut Dermawan dkk. (2023), Laju Pertumbuhan Penduduk, yang dipicu oleh fertilitas dan imigrasi, berpotensi meningkatkan kemiskinan, kalau tidak diimbangi melalui daya muat ekonomi beserta aset regional yang mencukupi. Tanpa kebijakan yang tepat, tekanan pada sumber daya, lapangan kerja, dan layanan publik dapat meningkat, sehingga memperlebar ketimpangan dan kemiskinan. BPS D.I. Yogyakarta (2024d) pada lampiran 1, menyajikan data bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi DIY mengalami penurunan selama periode 2017-2024. Tingkat terendah dalam delapan tahun terakhir adalah 0.58%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan angka kematian (3.277 orang) dan penurunan imigrasi (7.223 orang). Hal ini menunjukkan bahwa penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk belum mampu mengurangi kemiskinan, bahkan selama guncangan ekonomi. Keadaan ini memperkuat bahwa pengurangan kemiskinan tidak dapat diandalkan hanya pada perubahan demografis yang pasif. Artinya, usaha pengentasan kemiskinan membutuhkan strategi yang langsung mengukuhkan ketahanan ekonomi penduduk, bukan hanya menggantungkan pada penanganan jumlah masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah komponen berikutnya yang memengaruhi kemiskinan. Menurut Andykha dkk. (2018), kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai komponen, salah satunya kemampuan pembangunan manusia. Kualitas keahlian manusia ini dapat diketahui dengan IPM. Nilai IPM yang kecil mengakibatkan daya cipta tenaga kerja kecil, yang pada akhirnya menurunkan penghasilan, sehingga menaikkan total orang yang hidup dalam kemiskinan. BPS D.I. Yogyakarta (2024e) pada lampiran 2, menunjukkan bahwa data IPM untuk periode 2017-2024 telah meningkat. Pada tahun 2017, nilai IPM sebesar 78.89 didukung oleh RLS (9.19 tahun), HLS (15.42 tahun), dan AHH (74.74 tahun), serta pengeluaran per kapita (Rp. 13.53 juta). IPM DIY terus menunjukkan tren positif hingga 79.99 pada tahun 2019, dengan pertumbuhan stabil pada RLS (9.38 tahun), HLS (15.58 tahun), dan pengeluaran per kapita (Rp. 14.39 juta). Meskipun terjadi penurunan ringan menjadi 79.97 pada tahun 2020 akibat penurunan standar hidup (pengeluaran per

kapita sebesar Rp. 14.02 juta) selama krisis ekonomi, kendati demikian performa kesehatan dan pendidikan yang kuat membuat DIY tetap menjadi provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. IPM mencapai rekor 81.62 pada tahun 2024, karena pemulihan di semua sektor pembangunan. Ironisnya, capaian ini belum berkorelasi dengan perbaikan tingkat kemiskinan di wilayah ini.

Faktor terakhir yang terkait dengan kemiskinan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Menurut Praja dkk. (2023), pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang berdampak pada individu dan menjadi masalah serius, karena dapat menyebabkan penurunan nilai pendapatan dan pada akhirnya menimbulkan kemiskinan. BPS D.I. Yogyakarta (2024f) pada lampiran 3, menunjukkan bahwa TPT menunjukkan dinamika fluktuatif pada periode 2017-2024. Pada tahun 2017, TPT sebesar 3.02%, didukung oleh (2.053.168 pekerja) dan mayoritas pekerja terlibat dalam sektor informal (52.12%). Namun, saat periode 2018, TPT naik menjadi 3.35% akibat lonjakan pengangguran yang dipicu oleh penurunan pekerja formal. Kondisi ini mencapai puncaknya pada tahun 2020, ketika TPT melonjak drastis sebesar 1.43 poin, yaitu menjadi 4.57%, akibat berkurangnya jumlah penduduk usia kerja dan penurunan proporsi pekerja formal ke titik terendahnya (42.59%). Tren ini akhirnya membaik dalam tiga tahun terakhir hingga 2024 dengan TPT turun menjadi 3.48%, disertai penurunan tingkat pengangguran menjadi (78.667 orang), serta pemulihan struktur tenaga kerja formal (46.88%). Meski begitu, sektor informal tetap mendominasi struktur ketenagakerjaan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja belum sepenuhnya berkualitas dan berpotensi menghambat pengentasan kemiskinan.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti terkait hubungan antara PDRB per kapita, Laju Pertumbuhan Penduduk, IPM, dan TPT dengan kemiskinan. Akan tetapi, hasil yang diperoleh masih belum menggambarkan keserupaan. Studi Asri & Hanifa (2025) yang menyoroti periode 2018-2023, menampilkan koefisien negatif yang signifikan antara PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa tingginya PDRB per kapita berkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yang tercermin dari naiknya tingkat konsumsi per kapita. Di sisi lain, penurunan jumlah penduduk miskin juga dapat diupayakan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hasil yang berbeda didapatkan oleh Azizah & Asiyah (2022) menyoroti tahun 2017-2021, memaparkan PDRB per kapita tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai PDRB per kapita saat ini sudah memadai untuk mengatasi kemiskinan, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi harus tetap disertai dengan perhatian terhadap distribusi dan pemerataan. Hal ini penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Penelitian yang berbeda juga ditunjukkan oleh Rananda dkk. (2023), menyoroti tahun 2020-2022 dengan Regresi Linier Berganda sebagai teknik analisisnya, menemukan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di 7 Kota di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut berarti bahwa ketika Laju Pertumbuhan Penduduk meningkat, maka tingkat kemiskinan akan meningkat karena kurangnya sumber daya alam. Kurangnya sumber daya alam ini disebabkan oleh

pendapatan yang rendah. Masyarakat dengan pendapatan rendah seringkali mempunyai keluarga besar, dibandingkan dengan masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, Afifah & Imaningsih (2025), yang menyoroti tahun 2004-2023 dengan menggunakan Regresi Linier Berganda sebagai metode analisisnya, menemukan bahwa variabel Laju Pertumbuhan Penduduk tidak berkorelasi terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hasil tersebut yakni keberadaan sektor industri yang berkembang pesat di kabupaten Pasuruan, seperti di wilayah Rembang dan Beji, yang berpotensi sebagai penyerap tenaga kerja produktif. Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan didominasi oleh kelompok usia produktif (15–59 tahun) yang mencapai sekitar 66,4%, situasi yang serupa juga terjadi di Kabupaten Gresik. Kendati jumlah penduduk terus bertambah, kedua wilayah tersebut memiliki infrastruktur sosial dan ekonomi yang relatif baik. Dinamika sektor industri di Manyar, Driyorejo, dan sekitarnya juga berpotensi menampung tenaga kerja baru, sehingga pertumbuhan penduduk tidak menjadi beban terhadap tingkat kemiskinan.

Prasetyo & Fitanto (2023) memfokuskan periode 2012-2022 melalui teknik analisis Kausalitas Granger dan Regresi Data Panel (REM), menemukan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara IPM dan tingkat kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Tingginya IPM yang disertai dengan pendidikan yang mencukupi akan meningkatkan peluang penduduk dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta pendapatan guna memenuhi kebutuhan, yang kemudian akan menurunkan angka kemiskinan. Sebaliknya, Dwi & Huda (2025) memfokuskan periode 2007-2023, dengan Regresi Linier Berganda sebagai teknik analisisnya, menemukan bahwa IPM tidak berkorelasi secara signifikan kepada tingkat kemiskinan pada Provinsi Jawa Timur. Temuan ini disebabkan oleh distribusi yang belum merata dari perbaikan pada beberapa sektor tertentu, dimana peningkatan dalam kesehatan dan pendidikan terkonsentrasi di golongan atau daerah tertentu yang tidak mewakili populasi miskin secara keseluruhan.

Kirana & Nilasari (2025) menyoroti tahun 2019-2023, mengonfirmasi bahwa kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka secara signifikan meningkatkan kemiskinan di D.I. Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan oleh pengangguran ini dapat berakibat pada daya beli dan kualitas hidup penduduk. Maka dari itu, pemerintah sebaiknya berfokus pada penurunan angka pengangguran melalui pelatihan dan keterampilan, pemberdayaan penduduk, serta bantuan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan berbagai program ini, dapat mendorong penduduk dalam beradaptasi dengan pasar kerja, yang dapat menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi, penelitian lain yang dilakukan oleh Rosita & Imaningsih (2025) meneliti periode 2009-2023, dengan Regresi Linier Berganda sebagai metode analisisnya, menunjukkan hasil bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka tidak adanya pengaruh signifikan secara statistik terhadap kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Temuan ini menggambarkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Provinsi D.I Yogyakarta tidak mendapati masalah likuiditas, sehingga melemahkan akibat langsung pengangguran kepada kemiskinan. Selain itu, tidak semua individu yang menganggur tergolong miskin, mengingat mayoritas tersebut di provinsi ini berasal dari kalangan berpendidikan tinggi dan mempunyai ekonomi yang cukup stabil.

Inkonsistensi temuan dari berbagai studi terdahulu ini mengindikasikan bahwa korelasi indikator makroekonomi terhadap kemiskinan tidak bersifat linier mutlak, melainkan sangat terkait pada struktur ekonomi lokal dan rentang waktu pengamatan. Sebagian besar studi sebelumnya juga masih berfokus pada skala agregat provinsi lain, sehingga belum mampu menjelaskan secara mendalam dinamika pada daerah dengan karakteristik unik seperti D.I. Yogyakarta.

Di samping adanya celah literatur, terdapat gap fenomena yang sangat nyata di Provinsi D.I. Yogyakarta. Meskipun DIY secara konsisten mencatatkan capaian IPM tertinggi kedua di Indonesia dan naiknya PDRB per kapita dari tahun ke tahun, provinsi ini secara paradoks tetap mengantongi tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa (10.83% pada tahun 2024). Keterputusan antara indikator pertumbuhan ekonomi dan kualitas manusia dengan realitas kemiskinan riil ini menegaskan perlunya analisis yang mendalam pada level lokal. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah spasial dengan memfokuskan unit analisis pada seluruh level kabupaten/kota di DIY untuk menangkap disparitas antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Selain itu, secara temporal penggunaan rentang waktu 2017-2024 menjadi sangat krusial. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang masalah ekonomi dan memberikan landasan untuk mengembangkan kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

Hipotesis dalam penelitian ini menduga bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka berkorelasi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta periode 2017–2024.

METODE PENELITIAN

Metodologi kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menguji korelasi antara PDRB per kapita, Laju Pertumbuhan Penduduk, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan. Metodologi ini dipilih karena mendukung pengujian objektif melalui analisis statistik atas data numerik yang terstruktur.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi BPS D.I. Yogyakarta. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, antara lain Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, Kab. Gunungkidul, Kab. Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pemilihan DIY didasarkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini tertinggi di Pulau Jawa. Sementara periode penelitiannya selama delapan tahun dari tahun 2017 hingga 2024. Periode ini dipilih berdasarkan kelengkapan data untuk menganalisa pola ekonomi yang terjadi. Sehingga penelitian ini menggunakan data panel.

Penelitian ini menetapkan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Sementara itu, variabel PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (X_1), Laju Pertumbuhan Penduduk (X_2), Indeks Pembangunan Manusia (X_3), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X_4) ditetapkan sebagai variabel independen. Seluruh variabel diolah menggunakan data aktual, kemudian data PDRB per kapita dengan satuan rupiah ditransformasikan ke dalam Logaritma Natural untuk menyederhanakan interpretasi, menekan heteroskedastisitas, dan meningkatkan konsistensi estimasi.

Untuk menguji signifikansi korelasi parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat, penelitian ini menerapkan regresi data panel sebagai metode analisisnya. *Software* EViews-12 digunakan pada pengujian pemilihan model, asumsi klasik (heteroskedastisitas), dan pengujian hipotesis. Sementara, untuk mendeteksi multikolinearitas di periksa menggunakan nilai tolerance dengan menggunakan *Software* SPSS-22. Menurut Hsiao (2014) penggunaan regresi data panel sebagai teknik analisisnya memberikan beberapa keunggulan, seperti mampu menunjukkan peningkatan akurasi dan efisiensi karena penambahan dimensi *cross-section* dan *time-series* yang memperbesar derajat kebebasan dan mengurangi bias akibat variabel yang tidak teramati. Model persamaan regresi data panel, dapat ditetapkan sebagai berikut.

$$Tk_{it} = \alpha + \beta_1 \ln_PDRB_{it} + \beta_2 LPP_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

- i : 1,2, ...,n, menunjukkan unit data tampan lintang
- t : 1, 2, ...,t, menunjukkan unit data deret waktu
- α : Intersep/konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien regresi
- Tk_{it} : Tingkat kemiskinan untuk kota/kabupaten-i dan periode-t
- $\ln_PDRB_{it}$: Logaritma Natural PDRB per kapita untuk kota/kabupaten-i dan periode-t
- LPP_{it} : Laju Pertumbuhan Penduduk untuk kota/kabupaten-i dan periode-t
- IPM_{it} : Indeks Pembangunan Manusia untuk kota/kabupaten-i dan periode-t
- TPT_{it} : Tingkat Pengangguran Terbuka untuk kota/kabupaten-i dan periode-t
- ε_{it} : Error regresi unit untuk kota/kabupaten-i dan periode-t

Uji Spesifikasi Model

Uji Chow

Menurut Basuki (2021:60), uji Chow diterapkan untuk menyeleksi model yang tepat apakah Fixed Effect Model atau Common Effect Model, berikut hipotesisnya:

H_0 : CEM terpilih

H_1 : FEM terpilih

Uji Hausman

Menurut Basuki (2021:61), uji Hausman diterapkan guna menyeleksi model yang sesuai apakah Random Effect Model atau Fixed Effect Model, berikut hipotesisnya:

H_0 : REM terpilih

H_1 : FEM terpilih

Uji Lagrange Multiplier

Menurut Basuki (2021:61), uji ini diaplikasikan guna menyeleksi model yang tepat apakah Random Effect Model atau Common Effect Model. Bila hasil uji Chow dan Hausman menunjukkan FEM uji ini tidak perlu dilakukan, berikut hipotesisnya:

H_0 : CEM terpilih

H_1 : REM terpilih

Uji Asumsi Klasik

Widarjono (2007) dalam (Napitupulu dkk., 2021) regresi data panel sekedar memprioritaskan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Sementara itu, uji asumsi klasik lainnya tidak wajib.

Uji Multikolinearitas

Menurut Savitri dkk. (2021) pemeriksaan ini dijalankan untuk menelisik ada-tidaknya ikatan erat yang mengikat sesama variabel bebas dalam kerangka regresi. Diagnosa dilakukan melalui inspeksi terhadap angka Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila Tolerance melampaui batas 0.10 dan VIF tetap di bawah 10.00, gejala multikolinearitas dapat dinyatakan tidak terjadi pada kerangka tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Mardiatmoko (2020) uji ini dilakukan guna mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas, maksudnya adalah di mana kondisi ketika varians residual tidak sama antar observasi dalam model regresi. Pengujian ini menerapkan metode Glejser dengan meregresikan variabel bebas terhadap nilai absolut residual, di mana residual itu ialah selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi variabel terikat. Jika hasil uji menunjukkan nilai signifikansi di atas 0.05, maka model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji-F (simultan)

Priyatno (2022:68), uji ini bertujuan guna menyelidiki korelasi kolektif sejumlah prediktor terhadap variabel respons. Gujarati (2004), prosedur uji-F dilaksanakan pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=0.05$). Derajat kebebasan ditetapkan sebagai $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k$, dengan k melambangkan jumlah variabel penjelas dan n menyatakan total observasi. Simpulan diperoleh dengan membandingkan statistik-F hasil komputasi dengan nilai kritisnya, apabila statistik-F melebihi nilai kritis dan nilai-p yang bersesuaian berada di bawah 0.05, maka hipotesis yang mengasumsikan adanya korelasi signifikan secara bersama-sama dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat yang terbukti valid.

Uji-t (parsial)

Priyatno (2022:67), pengujian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi variabel bebas mana saja yang memberikan korelasi signifikan secara individual terhadap variabel terikat. Prosedur uji-t dijalankan pada tingkat signifikansi 5% dengan pendekatan satu sisi, sehingga tidak hanya menilai signifikansi korelasi, tetapi juga memastikan kesesuaian arah (positif atau negatif) dengan menerapkan derajat kebebasan yang dihitung berdasarkan formula $df = n - k$. Kesimpulannya apabila statistik uji-t yang diperoleh melampaui nilai kritisnya dan nilai probabilitas terkait berada di bawah 0.05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa variabel independen tersebut memiliki korelasi yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali & Ratmono (2017) koefisien determinasi (R^2) mengukur besaran kontribusi variabel-variabel penjelas mampu menjelaskan variasi dalam variabel respon. Rentang nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1, sebuah model dianggap

lebih baik ketika nilainya mendekati 1, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa daya penjelas model tersebut sangat terbatas. Adjusted R-Square digunakan meskipun nilainya tidak terpengaruh oleh penambahan jumlah variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regresi Data Panel FEM

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable	Tingkat Kemiskinan			
Method	Panel Least Squares			
Sample	2017-2024			
Periods included	8			
Cross-sections included	5			
Total panel (balanced) observations	40			
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability
C	60.44165	12.42352	4.85097	0.0000
PDRB	3.041541	3.461314	0.878724	0.3863
LPP	0.201512	0.238179	0.846053	0.4040
IPM	-1.007578	0.244595	-2.923947	0.0064*
TPT	0.147890	0.132169	1.118947	0.2718
R-Square	0.985149	Mean dependent var	12.39600	
Adjusted R-Square	0.981317	S.D. dependent var	4.515215	
S.E. of regression	0.617171	Akaike info criterion	2.067765	
Sum squared resid	11.80789	Schwarz criterion	2.447763	
Log likelihood	-32.35531	Hannan-Quinn criter	2.205161	
F-statistic	257.0532	Durbin-Watson stat	1.383898	
Prob (F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah menggunakan EViews-12 (2026)

Uji Spesifikasi Model

Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Probability
-------------	-----------	------	-------------

Cross-section F	48.159665	(4.31)	0.0000
Cross-section Chi-square	79.041777	4	0.0000

Sumber: data diolah menggunakan EViews-12 (2026)

Tabel 2, hasil uji Chow nilai probabilitas Cross-section Chi-Square dan Cross-section F 0.0000. Hasilnya menunjukkan dengan jelas bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, ini mengindikasikan bahwa FEM adalah model yang terbaik untuk digunakan.

Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Probability
Random Cross-section	192.638659	4	0.0000

Sumber: data diolah menggunakan EViews-12 (2026)

Tabel 3, nilai probabilitas dari Random Cross-section adalah $0.0000 < 0.05$, menurut hasil uji Hausman. Hasilnya menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa FEM ialah model yang sesuai untuk digunakan. Dalam hal ini ketika hasilnya FEM, maka prosedur analisis dapat dilanjutkan tanpa perlu melakukan uji Lagrange Multiplier.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Lampiran 4, setiap variabel bebas memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF berada di bawah 10.00. Berdasarkan nilai Tolerance dan VIF, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 5, probabilitas PDRB per kapita, Laju Pertumbuhan Penduduk, IPM, dan TPT jauh lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser dinyatakan bahwa ini tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Regresi FEM

Pada tabel 1, hasil regresi *Fixed Effect Model* diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$Tk_{it} = 60,44165 + 3,041541ln_PDRB_{it} + 0,201512LPP_{it} - 1,007578IPM_{it} + 0,147890TPT_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Berdasarkan estimasi *Fixed Effect Model* diatas, berikut interpretasi persamaan modelnya:

Persamaan regresi yang dihasilkan memiliki konstanta (C) sebesar 60.44165, nilai tersebut menyiratkan bahwa ketika seluruh variabel penjelas (X) bernilai 0, maka variabel respons (Y) akan meningkat sebesar 60.44165%, begitu pun sebaliknya.

Selanjutnya koefisien X1 (PDRB per kapita) sebesar 3.041541 menyiratkan bahwa

setiap penambahan X1 sebesar 1% berkontribusi pada kenaikan Y (tingkat kemiskinan) sebesar 3.041541% dengan asumsi nilai variabel penjelas lainnya tetap, begitu pun sebaliknya.

Koefisien X2 (Laju Pertumbuhan Penduduk) sebesar 0.201512 menyiratkan bahwa setiap penambahan X2 sebesar 1% berkontribusi pada kenaikan Y (tingkat kemiskinan) sebesar 0.201512% dengan asumsi nilai variabel penjelas lainnya tetap, begitu pun sebaliknya.

Koefisien X3 (IPM) sebesar -1.007578 menyiratkan setiap penambahan X3 sebesar 1% berakibat penurunan pada Y (tingkat kemiskinan) sebesar 1.007578% dengan asumsi nilai variabel penjelas lainnya tetap, begitu pun sebaliknya.

Koefisien X4 (TPT) sebesar 0.147890 menyiratkan bahwa setiap penambahan X4 sebesar 1% berkontribusi pada kenaikan Y (tingkat kemiskinan) sebesar 0.147890% dengan asumsi nilai variabel penjelas lainnya tetap, begitu pun sebaliknya.

Uji Hipotesis

Uji-F (simultan)

Merujuk tabel 1, diperoleh nilai probabilitas 0.000000 kurang dari 0.05 dan $F_{statistik}$ sebesar 257.0532 lebih besar dari F_{tabel} 2.86. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa variabel PDRB per kapita, Laju Pertumbuhan Penduduk, IPM, dan TPT berkorelasi signifikan secara bersamaan terhadap tingkat kemiskinan.

Uji-t (parsial)

Merujuk pada tabel 1, hasil analisis menunjukkan variabel PDRB per kapita memiliki nilai t_{hitung} $0.878724 < t_{tabel}$ 1.68830 dan p-value $0.3863 > 0.05$, sehingga X1 (PDRB per kapita) tidak berkorelasi secara parsial terhadap Y (tingkat kemiskinan).

Variabel Laju Pertumbuhan Penduduk memiliki nilai t_{hitung} $0.846053 < t_{tabel}$ 1.68830 dan p-value $0.4040 > 0.05$, sehingga X2 (Laju Pertumbuhan Penduduk) tidak berkorelasi secara parsial terhadap Y (tingkat kemiskinan).

Variabel IPM memiliki nilai t_{hitung} $-2.9923947 > t_{tabel}$ 1.68830 dan p-value $0.0064 < 0.05$, sehingga X3 (IPM) berkorelasi secara parsial terhadap Y (tingkat kemiskinan).

Variabel TPT memiliki nilai t_{hitung} $1.118947 < t_{tabel}$ 1.68830 dan p-value $0.2718 > 0.05$, sehingga X4 (TPT) tidak berkorelasi secara parsial terhadap Y (tingkat kemiskinan).

Koefisien Determinasi (R^2)

Merujuk pada tabel 1, nilai Adjusted R^2 adalah 0.981317. Nilai ini mengonfirmasi bahwa variabel-variabel bebas (X) secara kolektif dapat menerangkan 98.13% dari variasi dari variabel respons (Y). Mengingat variabel-variabel bebas yang dimasukkan dalam model hampir menjelaskan 99% variansi dari variabel terikat, dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki *goodness of fit* (kesesuaian) yang sangat baik. Hal ini ditegaskan oleh nilai Adjusted R^2 0.981317. Sisanya, yaitu sekitar 1.87% variasi, dapat diterangkan oleh variabel-variabel penentu eksternal yang tidak

dipertimbangkan dalam studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan

Merujuk tabel 1, hasil estimasi FEM terlihat koefisien PDRB per kapita positif sebesar 3.041541. Secara numeris, nilai ini mengisyaratkan bahwa setiap peningkatan satu unit PDRB per kapita diiringi kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 3.041541 persen. Namun, validitas statistik temuan ini diuji t-statistik diperoleh 0.878724 tidak melampaui nilai kritisnya 1.628830, dan nilai probabilitas 0.3863 jauh melampaui batas signifikansi 0.05. Dengan demikian, temuan menunjukkan sinyal kontradiktif, arah yang positif ini menunjukkan korelasi PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan yang tidak signifikan secara statistik. Dapat diinferensikan bahwa dalam model ini, PDRB per kapita bukan penentu yang kuat dari variasi tingkat kemiskinan. Temuan ini memaparkan bahwa hasilnya tidak mendukung asumsi teoritis *trickling-down effect* yang digagas oleh Hirschman (1958) yang mengilustrasikan terkait capaian pembangunan pada satu bagian masyarakat akan meluas ke bagian hilir, melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan memberikan peluang ekonomi, membantu mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih adil.

Ketidaksignifikanan ini berdasar pada realita yang terjadi di provinsi ini, kemiskinan terjadi akibat adanya ketimpangan distribusi manfaat ekonomi yang terpusat di wilayah perkotaan melalui sektor-sektor unggulan yang bersifat non-padat karya dan didominasi oleh pekerja terampil di wilayah perkotaan. Berdasarkan BPS D.I. Yogyakarta (2024g) Sleman mendominasi sektor bernilai tambah tinggi (industri manufaktur Rp. 7.879.75 miliar, konstruksi Rp. 7.549.02 miliar, dan akomodasi makanan dan minuman Rp. 6.794.23 miliar) dan juga Kota Yogyakarta unggul di sektor (akomodasi makanan dan minuman Rp. 6.636.96 miliar). Disisi lain Bantul menjadi penyangga mencatatkan PDRB per kapita menengah unggul di sektor (industri pengolahan Rp. 5.136.77 miliar, pertanian Rp. 4.913.82 miliar, dan penyediaan Akm. Makan dan minum Rp. 4.649.55 miliar). Sementara itu, daerah perdesaan masih mengandalkan sektor bernilai rendah dan produktivitas terbatas, seperti sektor pertanian (khususnya, Kulon Progo Rp. 2.566.07 miliar). Selain itu, adanya suatu kebijakan pembangunan yang lebih menguntungkan daerah perkotaan daripada daerah perdesaan, seperti yang dijelaskan oleh Faranisa dkk. (2025) kesenjangan D.I. Yogyakarta terjadi karena pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya terlalu terpusat di daerah perkotaan (seperti Yogyakarta dan Sleman).

Temuan penelitian diperkuat oleh Azizah & Asiyah (2022), yang membuktikan bahwa PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, karena PDRB harus tetap dikelola dengan menitikberatkan pada pendistribusian dan keadilan ekonomi. Hal ini krusial guna memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi terakumulasi secara inklusif hingga ke seluruh elemen masyarakat baik di kabupaten maupun kota.

Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap tingkat kemiskinan

Merujuk tabel 1, hasil estimasi FEM mengungkap koefisien Laju Pertumbuhan Penduduk positif sebesar 0.201512. Secara numeris, nilai ini mengisyaratkan bahwa setiap peningkatan satu unit Laju Pertumbuhan Penduduk diiringi kenaikan tingkat

kemiskinan sebesar 0.201512 persen. Namun, validitas statistik temuan ini perlu diuji, t-statistik yang diperoleh 0.846053 tidak melampaui nilai kritisnya 1.628830, dan nilai probabilitas 0.4040 jauh melampaui batas signifikansi 0.05. Dengan demikian, meskipun arah korelasinya positif, korelasi antara Laju Pertumbuhan Penduduk dan tingkat kemiskinan tidak signifikan secara statistik. Dapat disimpulkan bahwa dalam model ini, Laju Pertumbuhan Penduduk bukan penentu yang kuat dari variasi tingkat kemiskinan. Temuan ini memaparkan bahwa hasilnya tidak sesuai dengan teori pertumbuhan penduduk (Malthus, 1798), yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk bersifat eksponensial, sementara kapasitas produksi subsisten, khususnya pangan, hanya tumbuh secara linear. Disparitas fundamental ini pada akhirnya akan menekan pendapatan per kapita dan memicu tekanan kemiskinan. Kemudian, validitas statistik dari hubungan ini tidak terpenuhi karena t statistik yang diperoleh lebih rendah dari nilai kritisnya dan probabilitas melebihi tingkat signifikansi. Oleh karena itu, meski arah hubungannya positif, temuan tersebut tidak sejalan dengan teori.

Ketidaksignifikanan ini dicatatkan di BPS DIY (2021) pertumbuhan penduduk DIY yang masih terkendali melalui program Keluarga Berencana (KB), dan didukung oleh bonus demografi penggunaan optimal, di mana pangsa penduduk yang dominan pada rentang usia 15-64 tahun yang dianggap produktif merupakan keuntungan ekonomi yang besar. Selain itu karakteristik kawasan sebagai pusat pendidikan dan pariwisata menarik migrasi produktif, sehingga mendorong pertumbuhan penduduk, yang pada gilirannya mendorong perekonomian daerah. Berdasarkan data Bapperida DIY (2024a), jumlah migrasi masuk yang paling tinggi di Sleman (19.063 jiwa). Yang lain Gunungkidul (11.791 jiwa), Kota Yogyakarta (7.296 jiwa), Bantul (5.471 jiwa), dan Kulon Progo (5.481 jiwa).

Temuan penelitian ini diperkuat oleh Afifah & Imaningsih (2025), yang mengungkapkan bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk, dalam efeknya, tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pasuruan dan Gresik. Hal ini disebabkan oleh komposisi penduduk yang terkonsentrasi pada usia produktif. Dengan rentang usia 15 hingga 59 tahun yang mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian, selain itu perkembangan sektor industri yang pesat berhasil menyerap tenaga kerja secara maksimal, sehingga penambahan populasi justru menjadi potensi produktif yang mencegah naiknya kemiskinan.

IPM terhadap tingkat kemiskinan

Merujuk tabel 1, hasil estimasi FEM, koefisien Indeks Pembangunan Manusia (IPM) negatif sebesar -1.007578 menunjukkan korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan. Secara spesifik, setiap kenaikan satu unit IPM berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 1.007578 persen. Signifikansi statistik temuan ini diperkuat oleh nilai t-statistik sebesar 2.923947 yang melebihi nilai kritis 1.628830, serta probabilitas 0.0064 yang tidak melewati batas signifikansi 0.05. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa IPM memiliki korelasi negatif dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan, menyiratkan bahwa peningkatan kualitas manusia secara komprehensif efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini karena investasi strategis dalam sumber daya manusia, yang disalurkan melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, jadi secara kolektif mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja, produktivitas, dan memperkuat kapasitas kompetitif. Sehingga, perkembangan ini memicu peningkatan

standar hidup secara keseluruhan, yang secara efektif beroperasi untuk mengurangi dan mencegah kemiskinan.

IPM pada 5 Kab/kota di DIY memang tinggi, tetapi terdapat sedikit perbedaan, di mana Gunungkidul dan Kulon Progo memiliki IPM yang lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Salah satunya dapat dilihat dari komponen IPM, seperti yang dicatat BPS DIY (2024h), RLS Gunungkidul dan Kulon Progo (masing-masing 7.35 dan 9.20 tahun setara pendidikan SMP), sementara di kota, seperti Kota Yogyakarta 12.12 tahun setara dengan pendidikan SMA. Begitupun dengan kisaran pengeluaran perkapita yang dicatat BPS DIY (2024i) di perdesaan, seperti Gunungkidul (sebesar Rp. $588.561 \times 12 = \text{Rp. } 7.062.732$ dalam setahun) sementara di kota, seperti Yogyakarta (sebesar Rp. $833.761 \times 12 = \text{Rp. } 10.005.132$ dalam setahun).

Temuan ini memaparkan bahwa hasilnya sesuai dengan Teori *Human Capital* Becker (1964); Schultz (1961) dalam perspektif ekonomi modern, manusia diakui sebagai modal inti (*core capital*) yang nilai strategisnya sejajar dengan modal fisik. Investasi sistematis dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan bukanlah pengeluaran konsumtif, melainkan penanaman modal jangka panjang yang secara langsung memperkaya pengetahuan, mengasah keterampilan, dan mendongkrak produktivitas individu. Transformasi kapasitas personal ini pada akhirnya berkonversi menjadi peningkatan daya penghasilan, yang secara efektif mendorong penurunan angka kemiskinan secara struktural. Hasil ini konsisten dengan bukti sebelumnya dari Prasetyo & Fitanto (2023) yang menegaskan terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara IPM terhadap kemiskinan di D.I. Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan tentunya dapat mencapai kecukupan finansial untuk kebutuhan pokok harian.

Variabel IPM digunakan sebagai variabel komposit tunggal guna menangkap korelasi pembangunan manusia secara menyeluruh serta menjaga efisiensi dan stabilitas model dari potensi multikolinearitas antar komponen pembentuknya (RLS, HLS, AHH, dan pengeluaran). Kendati demikian, disadari terdapat potensi endogenitas secara konseptual antara indikator pengeluaran riil pada IPM dengan perhitungan garis kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan

Merujuk tabel 1, hasil estimasi FEM mengungkap koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka positif sebesar 0.147890. Secara numeris, nilai ini mengisyaratkan bahwa setiap peningkatan satu unit Tingkat Pengangguran Terbuka diiringi kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0.147890 persen. Namun, validitas statistik temuan ini perlu diuji, t-statistik yang diperoleh 1.118947 tidak melampaui nilai kritisnya 1.628830, dan nilai probabilitas 0.2718 jauh melampaui batas signifikansi 0.05. Dengan demikian, meskipun arah korelasinya positif, korelasi antara Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat kemiskinan tidak signifikan secara statistik. Dapat disimpulkan bahwa dalam model ini, Tingkat Pengangguran Terbuka bukan penentu yang kuat dari variasi tingkat kemiskinan. Temuan ini memaparkan bahwa hasilnya tidak sesuai dengan teori pengangguran Keynes (1936) yang mengidiskasikan pengangguran terjadi akibat rendahnya permintaan agregat, yang jika dibiarkan akan memperburuk kemiskinan. Kemudian, validitas statistik dari hubungan ini tidak terpenuhi karena t-statistik yang

diperoleh lebih rendah dari nilai kritisnya dan probabilitas melebihi tingkat signifikansi. Oleh karena itu, meski arah hubungannya positif, temuan tersebut tidak sejalan dengan teori.

Ketidaksignifikanan ini disoroti bahwa realitas yang terjadi pada D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa sektor informal berperan konsisten sebagai penyangga pendapatan masyarakat. Bapperida DIY (2024), menunjukkan bahwa proporsi pekerja informal sepanjang periode 2017-2024 selalu di atas 50%, yakni 52.12% pada 2017, meningkat menjadi 57.41% di tahun 2020, dan menurun menjadi 53.12% pada 2024. Meskipun demikian, jumlah tenaga kerja di sektor informal tetap lebih besar dari sektor formal. Kondisi ini mencerminkan fakta bahwa seseorang yang menganggur terus mempertahankan penghasilannya dengan beralih ke kegiatan informal. BPS D.I. Yogyakarta (2024j), Gunungkidul merupakan daerah dengan jumlah pekerja informal terbanyak selama 2017-2024 dengan akumulasi 2.489.485 orang, didominasi oleh sektor pertanian yang menyerap 1.414.309 tenaga kerja. Selain itu, sektor informal terbesar berada di Bantul (2.239.794 orang), Sleman (2.273.888 orang), Kulon Progo (1.323.872 orang), dan Kota Yogyakarta (753.602 orang), di mana sektor pertanian dan berbagai kegiatan informal lain yang tetap menjadi pilar utama dalam penyerapan tenaga kerja di seluruh daerah yang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan stabilitas keuangan rumah tangga dan bertindak sebagai alat taktis dalam inisiatif untuk mengurangi kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan Rosita & Imaningsih (2025), bahwa kemiskinan di Provinsi DI.Yogyakarta tidak terpengaruh secara signifikan oleh Tingkat Pengangguran Terbuka, karena sebagian besar rumah tangga memiliki ketahanan likuiditas yang memadai. Fenomena ini didukung oleh profil pengangguran yang didominasi oleh kelompok berpendidikan tinggi dari latar belakang ekonomi yang stabil, sehingga belum tentu masuk dalam kategori miskin. Selain itu, dominasi sektor pertanian dan ekonomi informal memberikan sumber pendapatan alternatif di luar lapangan kerja formal, yang pada akhirnya melemahkan korelasi linier antara meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kemiskinan.

KESIMPULAN

Analisis regresi data panel mengidentifikasi faktor penentu parsial kemiskinan di kabupaten/kota D.I. Yogyakarta periode 2017–2024. Hasilnya hanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berkorelasi negatif dan signifikan, mengonfirmasi bahwa peningkatan kualitas manusia melalui kesehatan dan pendidikan mampu meningkatkan kapasitas produktif dan pendapatan, sehingga mampu menekan kemiskinan. Sementara itu, variabel lain PDRB per kapita, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka, secara statistik tidak signifikan. Ketidaksignifikanan PDRB per kapita mengisyaratkan pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif dan terpusat di sektor non-padat karya di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta. Laju Pertumbuhan Penduduk yang tidak berkorelasi disebabkan suksesnya program keluarga berencana serta migrasi masuk yang didominasi penduduk usia produktif yang menjadi aset perekonomian, sehingga tekanan demografis terhadap kemiskinan berkurang. Adapun ketidaksignifikanan TPT menunjukkan peran krusial sektor informal sebagai *buffer* ketenagakerjaan yang mencegah lonjakan kemiskinan meski pengangguran tercatat tinggi.

Berdasarkan hasil temuan empiris, prioritas kebijakan utama harus difokuskan pada penguatan Indeks Pembangunan Manusia. Pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat kualitas layanan dasar melalui peningkatan akses pendidikan (beasiswa atau pelatihan vokasi), peningkatan kualitas kesehatan, serta penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Gunungkidul dan Kulon Progo. Selain itu dikarenakan adanya keterbatasan pada penelitian ini, untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk menguraikan korelasi komponen pembentuk IPM (seperti RLS, HLS, AHH, dan pengeluaran rill) atau menggunakan metode estimasi ekonometrika yang berbeda guna mengontrol potensi endogenitas lebih spesifik. Selain itu, tambahkan variabel baru, perpanjang masa penelitian, dan gunakan *Kuznets Hypothesis* dengan Teori Model Dual Sektor sebagai penguat untuk menganalisis fenomena dualisme ekonomi antara sektor formal dan informal yang mungkin terjadi di Provinsi DIY.

REFERENSI

- Afifah, D. N., & Imaningsih, N. (2025). Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 109–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpe.v8i2.3006>
- Andykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 33(2), 113–123. <https://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fe/article/view/671>
- Asri, Y. A. G., & Hanifa, N. (2025). Pengaruh Pengangguran, PDRB, dan Partisipasi Sekolah terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 5(1), 30–43. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/69626/52199>
- Azizah, A. N., & Asiyah, B. N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Sibatik Jurnal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2697–2718. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.420>
- Bapperida DIY. (2024a). *Pertumbuhan Penduduk*. https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/1-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil?bidang_urusan=1
- Bapperida DIY. (2024b). *Statistik Ketenagakerjaan*. https://bapperida.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=79
- Basuki, A. T. (2021). *ANALISIS DATA PANEL DALAM PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS (DILENGKAPI DENGAN PENGGUNAAN EVIEWS)* (Edisi Pert). PT. Raja Grafindo Persada.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. University Press.
- BPS DIY. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020 D.I. Yogyakarta*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1077/hasil-sensus-penduduk-2020>

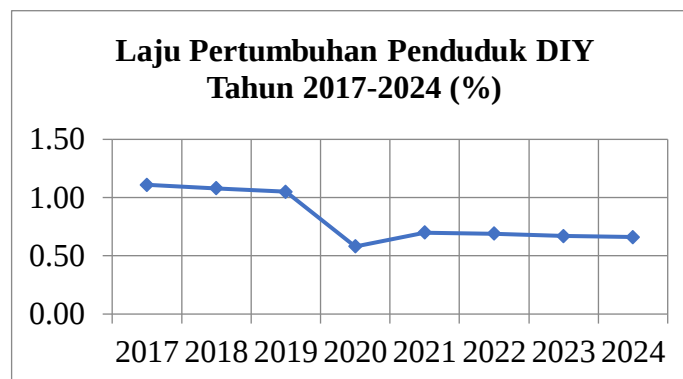
- BPS. (2024). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWeTISZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi--2024.html?year=2024>
- BPS D.I. Yogyakarta. (2024b). *Persentase Penduduk Miskin Provinsi D.I. Yogyakarta*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyIzI=/persentase-penduduk-miskin.html>
- BPS D.I. Yogyakarta. (2024c). *PDRB per kapita menurut Kab/Kota DIY*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzc0IzI=/pdrb-perkapita-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS D.I. Yogyakarta. (2024d). *Laju Pertumbuhan Penduduk*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/1/ODgjMQ==/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-2000-2010-dan-2019.html>
- BPS D.I. Yogyakarta. (2024e). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzE2IzI=-metode-baru-%20%20indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS D.I. Yogyakarta. (2024f). *Tingkat Pengangguran Terbuka*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY1IzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html>
- BPS D.I. Yogyakarta. (2024g). *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha dengan Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta*.
- BPS DIY. (2024h). *Metode Baru Rata Lama Sekolah DIY*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzE4IzI=-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>
- BPS DIY. (2024i). *Rata-rata pengeluaran per kapita menurut kabupaten kota di DI Yogyakarta*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTU2IzI=/rata-rata-pengeluaran-per-kapita-makanan-sebulan-menurut-kabupaten-kota-di-d-i--yogyakarta.html>
- BPS D.I. Yogyakarta. (2024j). *Keadaan Angkatan Kerja D.I. Yogyakarta*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication?keyword=angkatan+kerja&sort=latest>
- BPSDMP DIY. (2025). *Ancaman Siklon Tropis DIY*. <https://simpeltan.jogjaprovo.go.id/kegiatan/detail/potensi-ancaman-siklon-tropis-di-diy>
- Chambers, R. (1983). *Rural development, putting the last first*. Longman Group Ltd.
- Danti, R. N., Septiana, A. H., Sajidah, S., Abtasuni, A. I., & Desmawan, D. (2024). Pengaruh Jumlah Pengangguran Terbuka , Dan Pdrb Per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2023. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 218–227. <https://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris/article/view/570>
- Dermawan, D., Fitrianovaline, A., Latuconsina, A. D., Siregar, M. N., Ramdani, M. N., & Fauzan, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap

- Kemiskinan Provinsi banten 2017-2019. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(2), 554–558. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i2.4102>
- Dwi, E., & Huda, S. (2025). The Effect of Open Unemployment Rate , Human Development Index , and Minimum Wage on the Poverty Rate in East Java Province. *International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE)*, 4(5), 2697–2708. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/ijbae.v4i5.384>
- Faranisa, A. A., Pertiwi, A. T., Saptuti, I., Kawuryan, S., & Fevriera, S. (2025). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi DIY Tahun 2012-2023 dengan Pendekatan Model Mixed Effect. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 21(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.31940/jbk.v21i1.1-11>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *ANALISIS MULTIVARIAT DAN EKONOMETRIKA (Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EvIEWS 10) Edisi 2*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometrics* (Fourth Edi). The Mcgraw Hill Companies Inc.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. NEW HAVEN: YALE UNIVERSITY PRESS.
- Hsiao, C. (2014). *Analysis of Panel Data*. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. ISN ETH Zurich.
- Kirana, A. D., & Nilasari, A. (2025). The Effect of Economic Growth Rate , Human Development Index , and Open Unemployment Rate on Poverty in East Java Province. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 4(3), 1079–1094. <https://npaformosapublisher.org/index.php/fjmr/article/view/97>
- Malthus, T. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. J.Johnson. <http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf>
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Meytriana, A., Azahra, G. M., Khasanah, K. M., Artika, P. A., & Hotman. (2025). Peran Ekonomi Politik Dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran Di Indonesia. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3(2), 478–493.
- Napitupulu, R. B., Simanjutak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS-STATA-EVIEWS edisi-1*. Madenatera.
- Nasrulloh, R. I. (2025). Pengaruh Pertumbuhan PDRB dan IPM Terhadap Kemiskinan Kabupaten Sampang Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 5(1), 136-146. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v5i1.66049>
- Praja, R. B., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk , dan Tingkat

- Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Ecoplan*, 6(1), 78–86.
- Prasetyo, A. G., & Fitanto, B. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4), 760–773. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.05>
- Priyatno, D. (2022). Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linear dengan SPSS & Analisis Regresi Data Panel dengan Eviews. In *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linear dengan SPSS & Analisis Regresi Data Panel dengan Eviews*. Cahaya Harapan.
- Qomarina, N. N., Azira, N., Natal, R., Tarihoran, R., & Panggabean, V. E. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Periode 2004-2023). *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 2822–2834. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3923>
- Rananda, V., Muliasari, N. S., Noveliza, M., & Wulandari, N. A. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia , Laju Pertumbuhan Penduduk , dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan Jawa Barat 2020-2022. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* ,1(5), 134–141.<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/65>
- Rosita, M., & Imaningsih, N. (2025). Determination of Economic Growth, Human Development Index, and Open Unemployment Rate on Poverty Level in The Province of The Special Region of Yogyakarta. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 11113–11121. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/iijs/article/view/7369>
- Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristia, Nuraini, A., & Siregar, M. T. (2021). *STATISTIK MULTIVARIAT DALAM RISET*. Widina Bhakti Persada.
- Schultz, T. W. (1961). *Investment in Human Capital. The American Economic Review* (hal. 51 (1), 1–17). The American Economic.

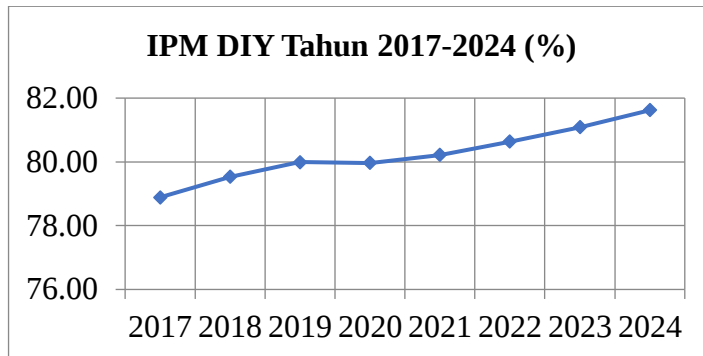
LAMPIRAN

Lampiran 1. Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Tahun 2017-2024



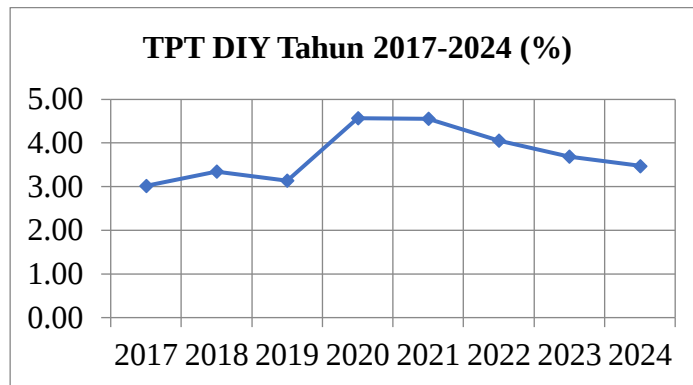
Sumber: BPS D.I. Yogyakarta (2024d)

Lampiran 2. Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2017-2024



Sumber: BPS D.I. Yogyakarta (2024e)

Lampiran 3. Tingkat Pengangguran Terbuka DIY Tahun 2017-2024



Sumber: BPS D.I. Yogyakarta (2024f)

Lampiran 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Tolerance	VIF
PDRB	0.209	4.790
LPP	0.818	1.223
IPM	0.272	3.681
TPT	0.210	4.764

Sumber: data diolah menggunakan SPSS-22 (2026)

Lampiran 5. Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Probability
C	0.309572	6.723615	0.046042	0.9636
PDRB	-0.273713	1.873265	-0.146116	0.8848
LPP	0.147901	0.128903	1.147383	0.2600
IPM	0.035704	1.0186495	0.191446	0.8494
TPT	-0.015641	0.071530	-0.218671	0.8283

Sumber: data diolah menggunakan EViews-12 (2026)